

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN DIGULIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA KOTA PONTIANAK

SUBIANDANI*¹
NIM. E1012161001

Sri Haryaningsih² Martinus²
***Email:subiandani@untan.ac.id**

1.Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

2.Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa bahwa komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dilihat dari transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian informasi sudah berjalan dan secara umum sudah baik, seperti adanya website dan media sosial sebagai media komunikasi, bekerja sama dengan banyak LSM dan sekolah-sekolah. Namun kelemahannya yang perlu di perbaiki dalam hal konsistensi agar fungsi komunikasi mengenai RTH tidak sebatas pada tugas semata, namun panggilan hati untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan adanya RTH. Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dilihat anggaran, staf, serta sarana dan prasarana dapat diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai disediakan. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak meliputi SOP dan pembagian tugas dimana dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara dinas terkait yang menciptakan hubungan yang harmonis dan pembagian tugas sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas, tidak ada permasalahan yang signifikan berdasarkan temuan yang ada. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan diharapkan sumber daya yang mendukung proses implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak harus ditingkatkan, seperti peningkatan fasilitas, dikarenakan peningkatan saran dan prasarana berpengaruh langsung dengan kepuasan pengunjung, dan agar meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau, khususnya Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Taman Digulis
Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak.**

***POLICY IMPLEMENTATION OF OPEN GREEN SPACE AT DIGULIS PARK IN
TANJUNGPURA UNIVERSITY, PONTIANAK CITY***

ABSTRACT

The research aims to find out and examine the policy implementation of open green space at Digulis Park in Tanjungpura University, Pontianak city. The method used in this research is qualitative with descriptive type. Research results obtained by the writer in the field indicate that the communication in the policy implementation of open green space at Digulis Park in Tanjungpura University, Pontianak city observed from information transmission, information clarity, and consistency of information delivery has been running well in general. There are a website and social media as communication media and the cooperation with many non-governmental organizations and schools. However, its weaknesses need to be improved in terms of consistency so that the communication function regarding green open spaces is not limited to mere tasks, but a call to improve the quality of the environment in the presence of green open spaces. Resources in the policy implementation of open green space at Digulis Park in Tanjungpura University, Pontianak city can be observed from budget, staff, facilities and infrastructure in which facilities and infrastructure have sufficed. Bureaucracy structure of the policy implementation of open green space at Digulis Park in Tanjungpura University, Pontianak city includes standard operational procedure and task division in which the implementation has been well. It can be observed from good coordination between related agencies that create harmonious relations and the task division has been divided in detail so that the role of each apparatus has been clearly established. There are no significant problems based on the findings. Suggestions that can be taken into consideration include supporting resources in the policy implementation process of open green space at Digulis Park in Tanjungpura University, Pontianak city which should be improved such as facilities due to improved facilities and infrastructure that affect visitor satisfaction directly. In addition, the community appreciation for open green spaces, especially Digulis Park of Tanjungpura University in Pontianak city should be improved.

Keywords: Implementation, Policy, Open Green Space, Digulis Park of Tanjungpura University, Pontianak city.

PENDAHULUAN

Taman kota merupakan suatu ruang terbuka diberbagai tempat pada suatu wilayah perkotaanyang secara optimal digunakan sebagai areal penghijauan dan berfungsi baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuannya. Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan taman kota untuk ruang terbuka publik adalah sebuahgambaran psikologis yang merupakankomponen utama pada suatu kota.

Pengelolaantaman kotadengan sangat baikserta memiliki fasilitas yang cukup memadaibertujuan untuk menarik wisatawanberkunjungketaman kota.Keberadaantaman kotamerupakan sesuatu yangsangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lanskap perkotaan.Taman kota bertujuan agar masyarakat lebihmenikmati waktu santai bersama keluarga atauorang terdekat untuk lebih berkualitas dandidukung dengan tersedianya sumber ilmu pengetahuan yang dirancang khusus padasuatutaman dapatmempersuasi masyarakat untukpola hidup yang baik, seperti mengikuti himbauan/peraturan-peraturan yang terdapat pada tamansehingga membuat masyarakat lebih suka untuk

menyesuaikan diri berada pada taman yang ada.

Taman digulis merupakan salah satu taman yang berpusat di jalan protokol A.Yani taman yang terletak ditengah kota Pontianak dengan memiliki luas sekitar 3 ha. Di area itutidak hanya ada taman, namun fasilitas jogging track turut disediakanserta berbagai jenis tumbuhan di sekitar taman. Taman Digulis juga terdapat potensi SDA dengan berbagai jenis tumbuhan. Menurut Dinas Pekerjaan Umum khususnya Dinas Pertamanan, tujuan dibangunnya Taman Digulis yaitu sebagai rekreasi, sarana olahraga, sarana taman bermain anak-anak dan sebagaitempatsantai untuk masyarakat serta taman untuk memperindah kota.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan berbagai fenomena permasalahan, yaitu sarana dan prasarana Taman Digulis Untankurang memadai, Padahal elemen-elemen seperti bangku taman, tong sampah, papan informasi, iklan hingga *public art* dapat menciptakan suatu ruang publik yang berkarakteristik serta mampu menunjang berbagai aktifitas publik.

Tabel 1.1.
Sarana Dan prasarana Di Taman Digulis
Untan Kota Pontianak

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kursi Taman	17
72	Tong Sampah	8
3	Pusat Informasi	0
4	Taman Bermain Anak	1
5	Pohon Hijau	35
6	Toilet	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, 2020

Taman Digulis Untan adalah taman kota, yang merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi — aktif maupun pasif. Taman Kota memiliki standar baik dari fasilitas maupun sarana dan prasarana, di samping sebagai tempat rekreasi warga kota, sebagai paru-paru kota harus memiliki setidaknya 150 batang pohon, juga sebagai pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta merupakan habitat berbagai flora dan fauna terutama burung.

Pusat informasi, ini diperlukan untuk tempat menerima dan menyampaikan informasi yang harus diberitakan kepada masyarakat. Misalnya

ada anak yang kehilangan orang tuanya, dapat menghubungi pusat informasi agar disiarkan kepada pengunjung taman, sedangkan di taman Digulis Untan tidak memiliki pusat Informasi. Dan jumlah tempat sampah, masih kurang, setidaknya untuk taman seluas 1,25 hektar per 1000 jiwa (minimal area adalah 1,25 hektar) di butuhkan 40 tempat sampah. Tempat duduk yang mencukupi dan nyaman belum terpenuhi di taman Digulis Untan, tidak jarang orang sering janji bertemu dengan teman atau berekreasi dengan keluarga di taman kota, sehingga haruslah dibuat tempat duduk yang nyaman untuk orang dapat bercengkrama dan melihat pemandangan sekitar.

Permasalahan selanjutnya yakni terkait isu ekonomi dengan Tidak adanya ruang untuk area ekonomi. Pemerintah tidak memberikan ruang untuk pusat perdagangan. Sebelum pemerintah mengadakan peraturan baru, banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Taman Digulis Untan. Karena banyak pedagang kaki lima tersebut sembarangan memilih tempat tanpa mereka sadari mereka membuat kerusakan tanaman – tanaman yang ada, sehingga pemerintah melakukan pelarangan untuk berjualan di kawasan Taman Digulis Untan.

Pembangunan Digulis Untan sebagaimana tertera dalam RTRW 2013-2033 belum terlaksana sepenuhnya, yang merupakan bagian wilayah Kota Pontianak belum tertata dengan baik serta masih banyak orientasi. Digulis Untan Pontianak direncanakan menjadi sebuah ruang publik dengan tata ruang luar dan massa yang terstruktur serta memiliki elemen-elemen arsitektural yang dapat mewadahi kegiatan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino:2008:21), dalam perspektif mereka

mendefinisikan kebijakan publik sebagai :“keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.” Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Frederich (dalam Agustino:2008:22), yang mengatakan bahwa kebijakan adalah: “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Federich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah

yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk

mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan.

Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena

publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut.

William N. Dunn (2000:116) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi

berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam

bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengelola negara atau daerah pemerintah membuat suatu keputusan-keputusan atau suatu kebijakan. Dimana dengan kebijakan ini diharapkan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan baik. Lembaga Administrasi Negara (2007:2), merumuskan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Kemudian Lasswell dan Kaplan (dalam Abidin 2002:19) menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and practice*).

Kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang

berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Selanjutnya dalam rangka kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan itu lazim dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (Mustofadidjaja, 2002:5). Sedangkan menurut William N. Dunn (2003:109), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah.

Thomas Dye (Subarsono, 2005:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Setiap kebijakan yang dibuat dalam sebuah Negara pasti punya dasar hukum bukan yang dibuat dengan sekehendak hati penguasa saja Anderson dalam Winarno (2002:18) mengemukakan tentang konsep kebijakan publik yang

mempunyai implikasi, yaitu: (1) berorientasi pada maksud dan tujuan dari perencanaan yang melibatkan segenap aktor politik sebelumnya; (2) pola tindakan dari pejabat-pejabat Pemerintah; (3) Sebagai non regulasi upah; dan (4) Bersifat positif dan negative.

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Gerston (2002:14) bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya.

Menyangkut kebijakan publik ini, Anderson (2006:10-17) membaginya kedalam empat kategori dari kebijakan publik, yakni kebijakan substantif dan procedural, kebijakan distributif, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan simbolik; serta

kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barang privat.

Mengingat peran penting dari kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat, maka para ahli juga menawarkan sejumlah teori yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan serta kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan tertentu. Menurut Anderson (2006:122-127), terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yakni: teori rasional-komprehensif; teori incremental; serta teori *mixed scanning*. Teori rasional-komprehensif adalah teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Sementara itu, teori incremental adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Adapun teori *mixed scanning* adalah teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori incremental.

Selanjutnya menyangkut kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu

kebijakan tertentu, Anderson (2006:127-137) mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yakni: (1) nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; (2) afiliasi partai politik; (3) kepentingan konstituen; (4) opini publik; (5) penghormatan terhadap pihak lain; serta (6) aturan kebijakan.

Kebijakan publik sebagai suatu proses terdiri atas tiga rangkaian siklus aktivitas kebijakan publik yang meliputi: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan tahap perumusan kebijakan yang memuat alternatif-alternatif yang ditawarkan untuk dijadikan pilihan dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut (Parson dalam Putra, 2003:78 dan Agustino, 2006:52).

Menurut Edward III dalam Agustino (2014:149) terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*) komunikasi sangat menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melakukan setiap kebijakan yang akan ditetapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

a. Transmisi

Aspek transmisi bertujuan agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi yaitu

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan

Aspek kejelasan bertujuan agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung agar dapat diterima dengan jelas atau komunikasi yang diterima haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi para implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa sumberdaya. Adapun Indikator sumberdaya dari beberapa elemen yaitu :

a. Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasikan kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

d. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi / organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *standart oprating prosedurs* (SOP) dan melaksanakan *fragmentasi*.

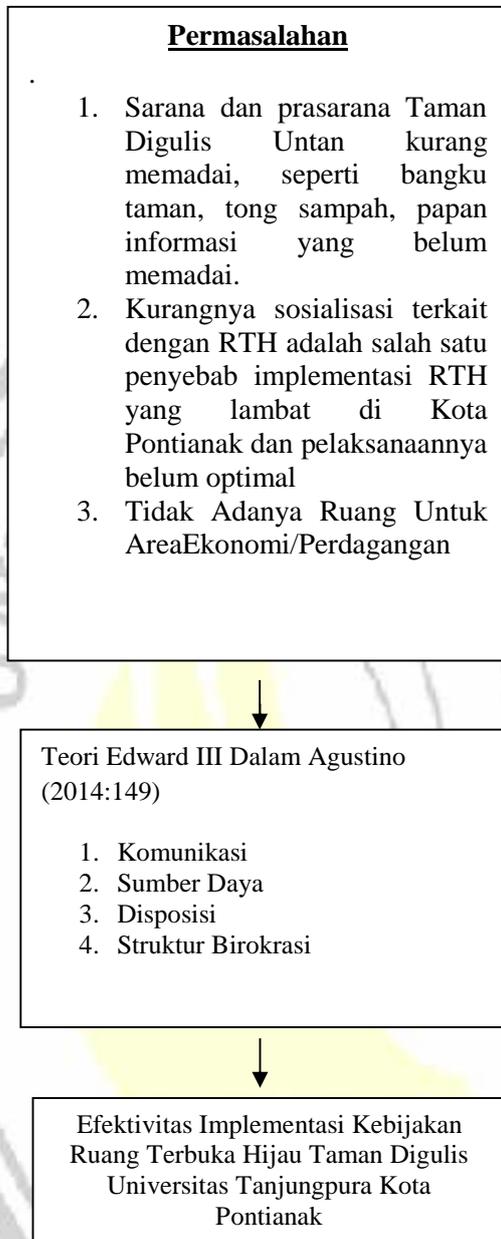
a. Aspek *standart oprating prosedurs*

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standart yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Dengan adanya SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

b. Aspek *Fragmentasi*

Fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran

atau uraian atas suatu keadaan sejelasa mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan yang tidak hanya dilakukan kepada para pelaku kebijakan, tetapi juga pada kelompok sasaran. Dalam teori George Edwards III dijelaskan bahwa komunikasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang akan diberlakukan untuk mencapai sasaran. Komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Tujuannya yaitu untuk pelaksanaan kebijakan atau program yang lebih efektif dan terkontrol sebagaimana tujuan yang ditetapkan. Dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel tersebut. Indikator yang pertama yaitu transmisi.

komunikasi yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi.

Transmisi adalah penyaluran atau penyampaian yang harus dilakukan secara baik yang bertujuan untuk dapat menghasilkan sesuatu implementasi yang baik juga. Penyampaian informasi dengan baik harus dimulai dulu dari pemerintah, internal pemerintah kota baru kemudian kepada masyarakat. Selain transmisi, dalam komunikasi hal lainnya yang penting adalah kejelasan informasi. Kejelasan informasi harus memiliki tujuan dan cara yang tepat sehingga informasi tersebut dapat ditangkap. Setelah itu yang penting lainnya adalah konsistensi yaitu menyampaikan informasi secara berkala baik sebagai pengingat maupun agar komunikasi dapat terjalan dengan baik. inas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Pontianak juga memiliki media sosial sebagai media untuk menyalurkan informasi. Media sosial tersebut adalah Twitter. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pertamanan analisis pemilihan Twitter adalah dalam 5 tahun terakhir media sosial tersebut yang paling banyak diakses oleh masyarakat Kota Pontianak.

Terkait komunikasi dalam implementasi kawasan terbuka hijau Di Taman Digulis Untan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Pontianak memaparkan sebagai berikut:

“Taman Digulis Untan ini akan kita tata dengan baik, secara bertahap dan sebagai wadah untuk kesenian dan budaya lokal juga menjadi salah satu fokus perencanaan kota. Dan selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada sekolah-sekolah dengan meminta waktu sekolah anak-anak tersebut untuk diajak jalan-jalan ke taman Digulis kota Pontianak dengan cara melakukan permainan dan tanya jawab mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau kepada anak-anak sekolah tersebut ” (Wawancara, tanggal 14 februari 2020).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa sosialisasi juga dilakukan kepada sekolah-sekolah dengan meminta waktu sekolah anak-anak tersebut untuk diajak jalan-jalan ke taman-taman kota di Pontianak dengan cara melakukan permainan dan tanya jawab mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau kepada anak-anak sekolah tersebut. Kemudian anak-anak sekolah tersebut diminta

pendapat perbandingan lebih penting antara pembangunan mall, hotel, dan fisik lainnya dengan mempertahankan keberadaan taman kota atau Ruang Terbuka Hijau

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu yang sangat penting. Komunikasi yang baik menuntut adanya kejelasan. Para pelaksana kebijakan harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah pengertian terhadap apa yang sudah disampaikan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Adapun materi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan LSM adalah materi mengenai konsep kota hijau, penerapan infrastruktur kota hijau, pentingnya lingkungan hijau, manfaat lingkungan hijau, dan macam-macam tanaman yang tepat sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan. Materi sosialisasi ini dilakukan melalui website, kampanye lingkungan hijau, mengadakan acara tertentu ataupun bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

2. Sumber Daya Manusia.

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan juga harus memiliki unsur sumber daya. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, maka suatu implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan, menurut Agustino indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah staff, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan untuk mendukung jalannya implementasi

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan

maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

Resources atau yang disebut dengan sumber daya dalam George Edwards berkaitan dengan jumlah tenaga kerja dan anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan RTH Publik dimulai dari pembebasan lahan, penanaman pohon, revitalisasi gedung dan peralatan kerja, penggajian, hingga kepada pemeliharaan taman. Sumber daya adalah hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang diatur dengan baik tanpa adanya sumber daya maka tidak ada yang membuat program, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan kebijakan RTH di Kota Pontianak. Bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Pada tahun 2015 luas RTH Publik dari keseluruhan wilayah Kota Pontianak adalah sebesar 12,15%. Pada tahun 2018 jumlah luas RTH memang naik menjadi sebesar 12,21% atau terjadi

peningkatan sebesar 0,06%. Dapat dilihat bahwa peningkatan tersebut terbilang cukup kecil selama 4 tahun.

Sumber daya lainnya yang diperlukan adalah karyawan yang bekerja baik di kantor maupun di lapangan, khususnya di bagian lapangan yang masih kekurangan tenaga kerja. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah tenaga kebersihan dan yang merawat taman hinggasaat ini terdiri dari 204 personil yang dibagi per grupnya menjadi 12 orang. Idealnya satu grup tersebut adalah sekitar 10 orang atau dalam hal ini terjadi gap sebesar 8 orang per grup, menurut bagian seksi pemeliharaan taman dan bagian teknis lapangan. Namun, perekrutan tersebut terbentur oleh kurangnya anggaran dalam menggaji. Sedangkan untuk bagian kantoran, dinas tidak mengalami kekurangan tenaga kerja.

Sarana atau fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna mewujudkan program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat

pada pelaksanaan kebijakan yang efektif karena fasilitas merupakan penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Sarana dan prasarana yang diamati dibagi menjadi dua yaitu pada kantor dan lapangan. Selain anggaran dan jumlah pegawai, hal yang lain tidak kalah pentingnya adalah memadai atau tidaknya sarana dan prasarana kerja staf yang bekerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Pontianak. Tanpa adanya 113 fasilitas yang memadai, maka tugas tidak akan terlaksana secara maksimal.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Teori Edward III (dalam Agustino 2014:150) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implemnetor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat berupa komitmen dan kejujuran para Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya apabila sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat

kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana efektif.

Komitmen adalah kesungguhan hati yang dilakukan oleh aparatur Kota Pontianak dalam implementasi RTH di Kota Pontianak. Secara umum dengan progres adanya peningkatan RTH di Kota Pontianak dari tahun ke tahun dapat mengindikasikan adanya keinginan untuk memperluas RTH dari tahun ke tahun. Namun, tingkat komitmen yang dimiliki oleh aparatur tersebut tidak optimal. Hal pertama yang dapat dilihat adanya korupsi anggaran RTH. Hal tersebut tentu merugikan negara untuk mencapai apa yang diamanatkan oleh UU. Dengan uang yang dikorupsi tersebut, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membeli lahan untuk membangun RTH ataupun kegiatan pemeliharaan lainnya. Pendapat dari beberapa masyarakat menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun dan memelihara RTH sudah baik.

Terkait dengan sejauhmana komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Pontianak, hal tersebut dapat diketahui dari hasil

wawancara peneliti dengan 2 orang masyarakat yang mengatakan:

“Taman di Kota Pontianak sudah baik, terawat, dan sepertinya makin banyak. Banyak fasilitas baru juga yang ditambah padatan di Kota Pontianak.” (Wawancara, tanggal 14 februari 2020).

Berdasarkan Wawancara tersebut diketahui bahwa pengelolaan taman sudah dilakukan dengan baik. Hal senada diungkapkan oleh masyarakat yang berkunjung ke Taman Digulis Untan, berikut ini:

“Mungkin udara di Kota Pontianak yang tambah segar karena banyaknya taman di Kota Pontianak. Selain itu, ada juga fasilitas hiburan untuk anak-anak.” (Wawancara, tanggal 14 februari 2020).

Sikap Aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi merupakan variabel yang terakhir dari empat variabel sebelumnya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Struktur birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan akan lebih mungkin memberikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dari pada harus menyesuaikan dengan jumlah personilnya. Hal tersebut akan mengakibatkan gemuknya struktur birokrasi. Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, SOP dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku.

Implementasi kebijakan membutuhkan suatu organisasi yang melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, disini terlihat bahwa betapa pentingnya struktur birokrasi karena dalam rangkaian birokrasi implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan SOP (Standard Operational Procedure) menunjukkan

adanya pengaturan berbagai tugas atau wewenang bagi setiap aparatur terkait dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Pontianak. SOP dibutuhkan agar dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab, yang melaksanakan, dan dalam rangka *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. SOP yang baik tentunya adalah SOP yang memudahkan bagi masyarakat dan efisien bagi para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilihat dari transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian informasi sudah berjalan dan secara umum sudah baik, seperti adanya website dan media sosial sebagai media komunikasi, bekerja sama dengan banyak LSM dan sekolah-sekolah. Namun kelemahannya yang

perlu diperbaiki dalam hal konsistensi agar fungsi komunikasi mengenai RTH tidak sebatas pada tugas semata, namun panggilan hati untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan adanya RTH.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilihat anggaran, staf, serta sarana dan prasarana dapat diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai disediakan.

3. Disposisi

Sikap aparatur dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilihat dari tingkat komitmen, sikap positif dan kejujuran masih perlu dibenahi agar tingkat korupsi anggaran tidak ada lagi disertai karyawan antusias untuk masuk kerja.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi SOP dan pembagian tugas dimana dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik antara dinas terkait yang menciptakan hubungan yang

harmonis dan pembagian tugas sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas. Tidak ada permasalahan yang signifikan berdasarkan temuan yang ada.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh dinas terkait dalam penyampaiannya seharusnya konsisten menyelenggarakan kampanye hijau, sosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan lebih aktif berkoordinasi dengan LSM Lingkungan.
2. Sumber daya yang mendukung proses implementasi harus ditingkatkan, seperti peningkatan fasilitas, dikarenakan peningkatan sarana dan prasarana berpengaruh langsung dengan kepuasan pengunjung, dan agar meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap ruang terbuka hijau, khususnya Taman Digulis Untan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana terkait kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat melalui tingkat komitmen, sikap positif, dan kejujuran. Secara umum sudah baik karena masyarakat sudah melihat

dampak positif mengenai peningkatan dan perawatan taman.

4. Struktur birokrasi merupakan standar prosedur operasional yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program, sehingga SOP yang baik tentunya adalah SOP yang memudahkan bagi masyarakat dan efisien bagi para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Moleong J, Lexy. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada University
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung : ALFABETA
- Abdul Wahab, Solichin. 2004, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Asmara, U Husna. 2004, *Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak: Hanura Bahagia.
- Dunn, William N. 2004, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, Sanapiah. 2002, *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Jones, Charles O. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mundrajad. 2007, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Meter, Donals, Van and Carl E. Van Horn. 1997, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society"*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Palumbo, Dj dan Marvin A. Harder. 1981. *Implementing Public Policy*. Toronto: Lexington Books.
- Rifley, Randall B. 1986. *Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT. Gita Karya.
- Siregar, Doli, D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan*

Daerah. Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi-UI.

Tachjan.2006, *Implementasi Kebijakan
Publik*. Pontianak: AIPI

Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik
dan
Transparansi
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah*. Pontianak : Alfabeta

Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta:
Erlangga.

Winarno, Budi. 2004. *Teori
Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta:
Pusat Antar Universitas Studi
Sosial UGM

